

Praktik Pengelolaan Terbaik Petani RSP0

untuk Budi Daya Sawit yang
sedang Berjalan di Lahan
Gambut

Draf untuk Konsultasi Publik

BAB 7

Studi Kasus
Penerapan BMP





PERNYATAAN SANGKALAN

Pernyataan, informasi teknis, dan rekomendasi yang tertuang dalam Panduan ini didasarkan pada praktik terbaik dan pengalaman serta disusun oleh anggota Kelompok Kerja Lahan Gambut 2 (PLWG 2) dan subkelompok Petani Swadaya-PLWG RSPO. Pedoman dalam Panduan ini tidak serta-merta mencerminkan pandangan Sekretariat RSPO atau kontributor, sponsor, dan pendukung perorangan mana pun yang terlibat dalam proses penyusunannya. Publikasi Panduan ini bukan merupakan suatu upaya dukungan dari RSPO, PLWG, maupun peserta atau pendukung mana pun terhadap pembangunan perkebunan sawit baru di lahan gambut. Segala upaya dikerahkan agar Panduan ini lengkap dan akurat. Meski demikian, masih terdapat kemungkinan adanya kealpaan atau kesalahan, baik dalam hal pengetikan maupun substansinya, dan seiring waktu, substansi yang ada saat ini dapat saja tergantikan dengan substansi yang baru. Oleh karena itu, tulisan ini hanya dapat dipergunakan sebagai panduan, bukan sebagai satu-satunya dasar bagi pengelolaan perkebunan di lahan gambut. Hasil pelaksanaan praktik ini mungkin berbeda-beda tergantung pada kondisi setempat. RSPO, PLWG, dan semua kontributor atau pendukung yang terlibat dalam proses penyusunan tidak bertanggung jawab secara hukum atas hasil penerapan panduan ini.



UCAPAN TERIMA KASIH

RSPO mengucapkan terima kasih kepada Subkelompok Petani Lahan Gambut RSPO dan semua anggota PLWG 2 yang selalu memberikan dukungan dan pengetahuannya serta menjalankan peran utama dalam penyelesaian Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) Petani RSPO untuk Budi Daya Sawit yang sedang Berjalan di Lahan Gambut

Apresiasi khusus diberikan kepada kelompok petani yang telah berpartisipasi dalam menguji coba PPT ini atas umpan balik yang membangun dan sangat membantu dalam mengembangkan substansi PPT ini.

DAFTAR GAMBAR

Jasa Penyuluhan oleh Perusahaan	7
Pelibatan pemangku kepentingan	9
Dukungan/bantuan tingkat pemerintah	9
Bantuan keuangan dari Malaysia/Indonesia	9
Embung di lapangan	10
Perbaikan Lingkungan.....	11
Konteks	11
Tujuan	12
Pendekatan	13
Hasil	12
Peningkatan Sosial	13
Tantangan.....	13
Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (FPIC).....	14

PEDOMAN UNTUK MENGGUNAKAN PPT INI

PPT ini terdiri dari 7 Bab yang berfokus pada berbagai topik terkait budi daya sawit yang sedang berjalan di lahan gambut.

Untuk tujuan kepatuhan audit terhadap Standar Petani Swadaya RSPO, Dokumen Pedoman Audit telah disusun dan salinannya disertakan sebagai Lampiran ().

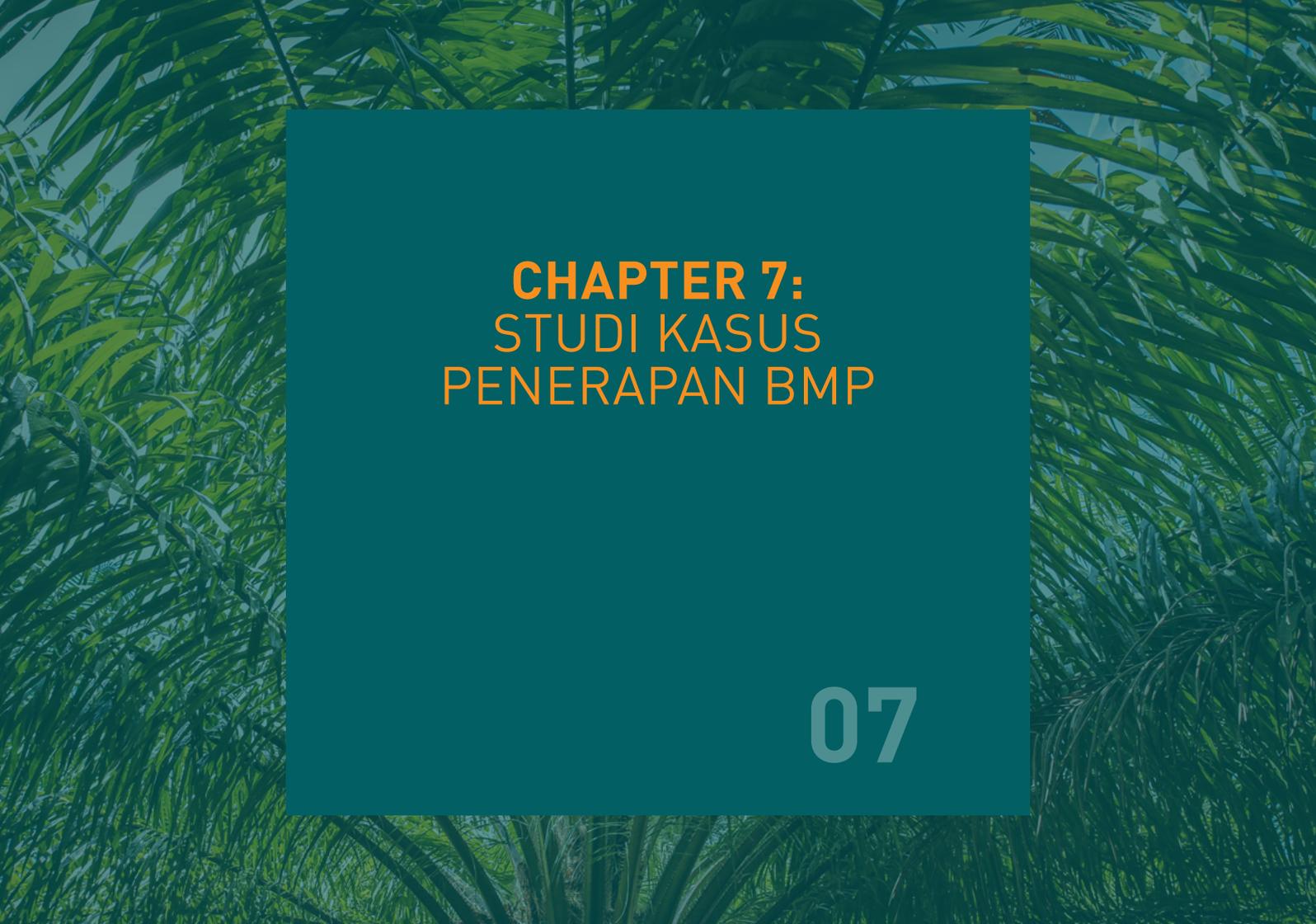
For the purpose of audit compliance to the RSPO Independent Smallholder Standard, a separate Audit Guidance Document has been prepared and a copy is included as Annex ().

APA YANG DIDAPAT PENGELOLA KELOMPOK DARI PPT INI

Tujuan panduan ini adalah memberikan serangkaian pedoman praktis mengenai PPT bagi Pengelola Kelompok dan/atau petani untuk mengelola budi daya sawit yang sedang berjalan di lahan gambut tropis sesuai dengan Kriteria 4.4 dan 4.5 dalam Strategi Petani Swadaya RSPO tahun 2019.

KEBERLAKUAN PPT INI PADA SAAT AUDIT

PPT ini disusun sebagai pedoman yang direkomendasikan bagi petani swadaya dengan budi daya sawit yang sedang berjalan di lahan gambut. PPT ini bukan merupakan praktik wajib dan tidak digunakan untuk sertifikasi karena kondisi lahan selalu bervariasi. Pengelola kelompok atau petani wajib mengevaluasi kondisi perkebunan sebelum menerapkan PPT ini.



**CHAPTER 7:
STUDI KASUS
PENERAPAN BMP**

07

7.1 JASA PENYULUHAN OLEH PERUSAHAAN

Jasa Pelatihan

Berbagai pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan petani, menambah jaringan sehingga mengembangkan efisiensi diri untuk mencapai produktivitas yang baik dan peningkatan praktik pengelolaan pertanian.

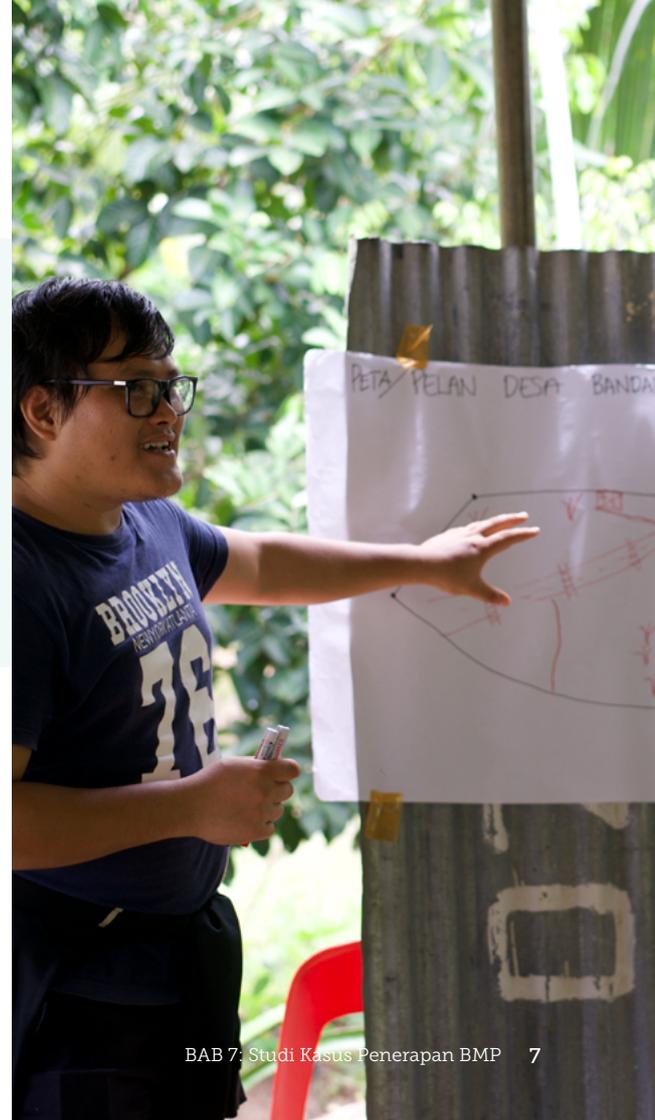
Pelatihan yang diperlukan berkaitan dengan budi daya sawit di lahan gambut:

1. Sertifikasi
2. Penyerapan unsur hara
3. Pengelolaan air
4. Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
5. Pencegahan dan pengendalian kebakaran
6. Subsidi/emisi GRK

1. Akademi Pelatih Petani RSPO (RSPO Smallholder Trainer Academy/STA)

Suatu inisiatif yang dilakukan RSPO untuk memberi peluang lebih luas bagi petani secara global agar dapat mengakses pelatihan. STA dibangun dengan fokus meningkatkan mata pencaharian petani dan praktik berkelanjutan. Pendekatannya berupa Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers), dan akan bekerja bersama mitra dari sektor terkait untuk memperluas kemampuan 'dari lapangan hingga pelatihan'. Setiap organisasi perusahaan ataupun bukan perusahaan yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung dengan petani bisa menjadi Mitra STA.

Untuk info lebih lanjut, kunjungi: <https://portal.sta.rspo.org/asp/Home>



2. Lembaga pemerintah yang mendukung petani di Malaysia – Pusat Tunas MPOB.

Guna meningkatkan produktivitas, petani harus menyesuaikan praktik pertanian yang baik dan pengetahuan yang mumpuni mengenai budi daya sawit. Karena itu, Pusat Tunas di bawah naungan MPOB berperan penting dengan memberikan panduan teknis seperti bincang-bincang, kursus singkat, kelas langsung, demonstrasi di lokasi.



7.2 PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN



Gambar 25: Kelompok Petani Bersertifikat RSPO di Kalimantan Tengah dibantu PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) dalam melakukan pemantauan titik kebakaran

Larangan penggunaan api untuk penyiapan lahan merupakan kriteria penting dalam Standar Petani Swadaya RSPO yang diadopsi pada bulan November 2019. Salah satu kelompok bersertifikat di Kalimantan Tengah, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri telah menyadari bahwa kebakaran di satu tempat dapat menyebar ke tempat lain dengan cepat, terutama lokasi yang berdekatan dengan lahan gambut yang terbakar. Dalam upaya memitigasi musim kemarau dan kebakaran lahan, rombongan didampingi oleh petani anggota RSPO yaitu PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) membentuk unit pencegahan kebakaran dan pelatihan mengenai deteksi titik api (hotspot) melalui aplikasi android. Titik api dapat dengan mudah dipantau melalui kompas dan peta digital yang tertanam di telepon.

Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) Petani RSPO untuk Budi Daya Sawit yang sedang Berjalan di Lahan Gambut

7.4 DUKUNGAN/BANTUAN TINGKAT PEMERINTAH

7.4.1 BANTUAN KEUANGAN DARI MALAYSIA/INDONESIA

Untuk memastikan hasil panen petani terus bersaing dan produktif, pada bulan Juli 2019 pemerintah Malaysia menyediakan dua skema pinjaman dana sebesar RM550 juta selama satu tahun dengan suku bunga 2%. Skema bantuan ini dialokasikan untuk Program Pembiayaan Mudah Tanam Semula (TSPKS) sebesar RM500 juta dan Input Pertanian Sawit (IPPKS) sebesar RM50 juta. Skema ini bertujuan meringankan beban keuangan petani swasta dalam proses pelaksanaan penanaman kembali sawit dan membantu petani mendapatkan input pertanian seperti benih bersertifikat dan bibit berkualitas. Pemohon yang disetujui memperoleh pendanaan harus menunjukkan bukti penanaman, areal penanaman, pupuk dan pengendali gulma dan hama sesuai dengan praktik pertanian yang baik. Pemohon juga harus mengajukan sertifikasi MSPO di Sustainable Palm Oil Cluster (SPOC). Skema yang diberikan dapat bermanfaat bagi 15.000 petani di seluruh Malaysia yang telah bergabung dengan Sustainable Palm Oil Cluster (SPOC). Karena itu, skema semacam itu tidak hanya meringankan beban keuangan, tetapi juga mendorong lebih banyak petani untuk bergabung dalam klaster sertifikat sawit berkelanjutan.

Bantuan keuangan dapat mendorong sertifikasi minyak sawit berkelanjutan



7.4.2 EMBUNG DI LAPANGAN

Selain memiliki bangunan pengendali air pada saluran drainase yang ada, pembangunan kolam retensi dapat menjadi salah satu cara untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kebakaran. Air yang berlebih, terutama yang dihasilkan dari air hujan saat musim kemarau, atau saluran yang ada disimpan di dalam bangunan sebelum musim kemarau datang dan berfungsi sebagai waduk air bagi para petani. Dikenal sebagai 'embung' di Indonesia, kolam penampungan ini tidak hanya dapat digunakan untuk persiapan kebakaran, tetapi juga dapat digunakan untuk menarik turis. Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana mulai dari Rp200-500 juta/embung untuk program pembangunan embung desa. Dengan demikian, pembangunan ini memberikan keuntungan bagi petani di kawasan gambut.



Struktur 'embung' sederhana berukuran 4 m x 6 meter x kedalaman 3 meter dapat dibangun oleh petani di perkebunannya. Konstruksinya dapat dibangun secara manual dan bergotong royong, dan durasi konstruksi bergantung pada kondisi lahan gambut. Untuk membangun embung dengan dimensi sederhana ini diperlukan waktu selama 15 hari, jika proses penggalian melibatkan ekstraksi massa akar yang besar.



Gambar 26: Contoh embung yang dibuat di Kubu Raya, Kalimantan Barat. (Sumber mediaindonesia.com)

Struktur tambahan tidak hanya membantu petani mengatasi terjadinya kebakaran tetapi juga memperpanjang penggunaan lahan gambut dan meningkatkan hasil TBS.

Struktur yang dapat diterapkan untuk mencegah kebakaran:

1. Sumur bor
2. Kolam / Embung

Struktur yang dapat diterapkan untuk memperoleh efisiensi:

1. Sistem saluran yang ditingkatkan
2. Sekat kanal/Penghalang
3. Bendung

Struktur yang dapat diterapkan untuk memantau pengelolaan air:

1. Penanda tingkat muka air
2. Piezometer

7.5 PERBAIKAN LINGKUNGAN

Artikel ini diambil dan ditulis ulang dari Sustainable and climate friendly palm production and procurement, GIZ. Upaya ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir (BMU) Federal Jerman. Indonesia, Thailand, dan Jerman terlibat dalam upaya ini dari tahun 2018 hingga 2022.

7.5.1 KONTEKS

Saat ini, minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Sejalan dengan hal ini, area produksi sawit di daerah tropis meningkat dan produksi minyak sawit menjadi sumber pendapatan penting bagi petani serta pemangku kepentingan lainnya di wilayah pedesaan.

Selama beberapa dekade terakhir hutan hujan dan lahan gambut telah digantikan perkebunan sawit. Sementara, pembukaan hutan dan degradasi akibat pertanian dan perkebunan skala kecil, termasuk sawit, terus meningkat.

Gambaran ini berubah jika produksi sawit dilakukan dengan berpegang pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Prinsip ini diperlukan untuk menghindari deforestasi lebih lanjut, meningkatkan pasokan minyak sawit yang diproduksi secara berkelanjutan, dan memperbaiki mata pencaharian petani.

Pemerintah dan bisnis publik juga membeli produk berbasis minyak sawit dalam skala besar. Sebagian besar produk makanan di Jerman dibuat dari minyak sawit bersertifikat. Namun, penggunaan minyak sawit bersertifikat oleh badan pengadaan umum dan industri pakan hewan harus semakin ditingkatkan.



7.5.2 TUJUAN



Mengurangi emisi gas rumah kaca dari produksi minyak sawit



Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial pada perkebunan sawit rakyat.



Meningkatkan jumlah petani bersertifikat sesuai standar keberlanjutan yang dapat dipasarkan.

7.5.1 PENDEKATAN

Proyek ini berfokus pada rantai nilai, mulai dari pemanfaatan dan budi daya lahan, pemanenan, dan pemasaran hingga ke konsumen. Untuk mencapai tujuan ini, pihak otoritas pemerintah, perusahaan, dan petani di Thailand dan Indonesia membentuk kemitraan multipemangku kepentingan.

Tim proyek ini mendukung pengembangan rencana pemanfaatan lahan yang melibatkan petani, perwakilan pemerintah, dan perusahaan swasta. Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh para pelaku di sepanjang rantai nilai, seperti operator PKS, pihak perantara, dan perusahaan multinasional, bertujuan untuk memberikan insentif terhadap transisi yang dilakukan untuk menuju produksi yang berkelanjutan.

Di Jerman, proyek ini mendorong permintaan masyarakat dan pihak swasta terhadap produk-produk yang terbuat dari minyak sawit yang diproduksi secara berkelanjutan. Badan pengadaan publik serta perusahaan pakan ternak disarankan untuk membeli produk bersertifikat. Selain itu, kesadaran akan minyak sawit berkelanjutan telah meningkat dengan dilakukannya perundingan meja bundar (round table) bersama perusahaan dan adanya portal konsumen

Mitra dari proyek ini yaitu Departemen Pertanian dan Departemen Penyuluhan Pertanian Thailand, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS), dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Environmental Action Germany (Deutsche Umwelthilfe e.V. – DUH) di Jerman.

7.5.4 HASIL

- Dengan melestarikan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) dan meningkatkan praktik pertanian, emisi GRK yang berasal dari budi daya sawit dapat berkurang hingga 25.000 ton CO₂. Perkebunan sawit baru di areal percontohan hanya dikembangkan di petak-petak yang sudah ada atau di areal yang belum ditanami sebelumnya.
- Ada lebih dari 3.100 petani di Indonesia dan Thailand yang dilatih mengenai praktik budi daya yang berkelanjutan dan berupaya mendapatkan sertifikasi berkelanjutan.
- Yurisdiksi yang ada di negara-negara produsen memanfaatkan strategi dalam menerapkan kriteria keberlanjutan dan rencana penggunaan lahan secara resmi.
- Badan Pengadaan Publik Jerman meningkatkan pembelian produk minyak sawit bersertifikat hingga sekurangnya 10 persen.

7.6 PENINGKATAN SOSIAL

Artikel ini diambil dan dikutip dari USAID mengenai berita lanskap terkait Pelibatan Komunitas dalam Restorasi Gambut: Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC)

7.6.1 TANTANGAN

Kebakaran hutan dan lahan yang berulang kali terjadi di Indonesia mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan dan ekonomi masyarakat setempat. Kebakaran ini juga menyebabkan emisi GRK dalam jumlah besar dan hilangnya keanekaragaman hayati yang begitu besar dan tidak bisa dipulihkan. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2015, bencana yang disebabkan oleh manusia ini merugikan Indonesia hingga 16 miliar Dolar. Di Provinsi Kalimantan Tengah, ancaman ini diperparah dengan adanya pembangunan kanal-kanal besar untuk mengalirkan air dari lahan gambut, sehingga tanah di areal ini menjadi sangat rawan terhadap kebakaran. Baru-baru ini, berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Restorasi Gambut (BRG), dan pemerintah daerah, didesak untuk melakukan pembatasan aliran air dari lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga agar muka air tetap tinggi dan lahan gambut tetap lembap selama musim kemarau, menyediakan drainase yang memadai guna memitigasi terjadinya banjir di musim hujan, dan memberikan akses terbatas bagi masyarakat setempat untuk mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan.

7.6.2 PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL DAN TANPA PAKSAAN (FPIC)

Untuk mendukung inisiatif ini, USAID LESTARI baru-baru ini menyelesaikan model kegiatan pelibatan pemangku kepentingan dengan memfasilitasi FPIC di desa-desa yang mencakup sekitar 30.000 ha lahan gambut terdegradasi. Lahan gambut ini merupakan bagian dari kawasan yang mencakup kurang dari 5% dari seluruh wilayah provinsi, tetapi menyumbang 30% dari semua dampak kebakaran di tahun 2015. Fasilitasi FPIC memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi tentang penyekatan kanal, berkesempatan memberikan masukan, dan memberikan persetujuannya untuk membangun, memelihara, dan melindungi bendungan. Masyarakat setempat khususnya dapat memengaruhi rancangan bendungan agar perahu/kapal kecil mereka dapat melewati saluran pelimpah untuk mempertahankan mata pencahariannya. LESTARI memberikan dukungan teknis dan finansial terhadap proses FPIC yang dimediasi oleh forum multipemangku kepentingan di tingkat kabupaten. Dukungan ini diberikan dengan mematuhi panduan perlindungan sosial untuk FPIC.

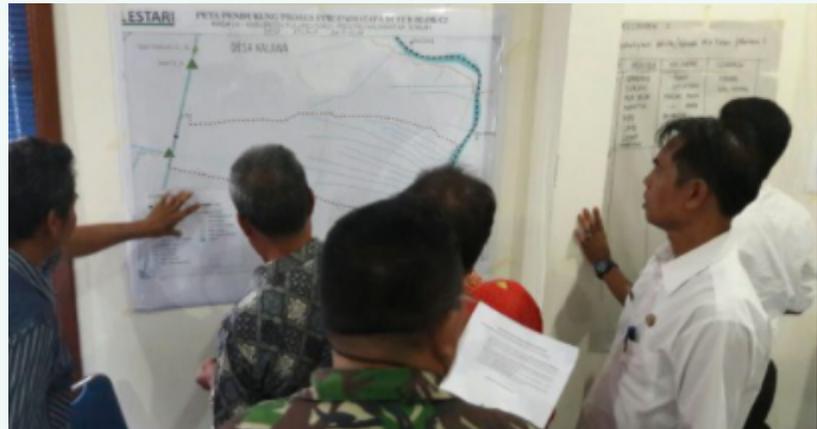


Gambar 27: Pelibatan masyarakat di restorasi lahan gambut: FPIC (Sumber: USAID - Lestari, Indonesia)

Pencapaian Penting

Penerapan FPIC secara luas oleh masyarakat setempat dan lembaga pemerintah menghasilkan pengakuan formal (Berita Acara) yang memberikan legalitas hukum. BRG mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya Indonesia melakukan restorasi lahan gambut melalui penyekatan kanal dengan didasarkan pada FPIC.

Selain itu, BRG juga telah menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan penyekatan kanal harus tunduk pada komitmen FPIC. Guna meresmikan pendekatan dan mendukung keberlanjutannya, LESTARI mendapatkan persetujuan bahwa FPIC akan menjadi Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam perancangan dan pelaksanaan penyekatan kanal pada panduan Pekerjaan Umum. Kepala BRG juga telah memutuskan bahwa FPIC yang didukung LESTARI akan menjadi model perencanaan pemanfaatan lahan di Sumatera.



Gambar 28: Pemangku kepentingan FPIC diberikan informasi mengenai rencana penyekatan kanal (Sumber: USAID - Lestari, Indonesia)

LAMPIRAN 1: DAFTAR PERIKSA AUDITOR STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

Kriteria	Indikator	Daftar Periksa
<p>4.4 Jika petak lahan pekebun berada di atas gambut, pelesakan/subsidi dan degradasi tanah gambut tersebut diminimalkan melalui penerapan praktik pengelolaan terbaik (PPT).</p> <p>Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang memiliki petak lahan yang berada di atas gambut? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p>	<p>4.4 E Manajer kelompok mengonfirmasi keberadaan gambut pada petak lahan yang ada di dalam kelompok dan pekebun yang petak lahannya di atas gambut berkomitmen untuk menggunakan PPT dan meminimalkan pelesakan/subsidi dan degradasi tanah gambut (lih. 1.1 E dan Lampiran 2).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah manajer kelompok telah mengidentifikasi keberadaan gambut pada petak lahan anggota kelompok? 2. Berapa banyak anggota kelompok yang petak lahannya berada di atas gambut? 3. Apakah pekebun telah menandatangani pernyataan untuk berkomitmen menggunakan PPT dan meminimalkan pelesakan/subsidi dan degradasi tanah gambut? 4. Apakah manajer kelompok mengetahui PPT untuk gambut?
	<p>4.4 TC A Pekebun menyelesaikan pelatihan mengenai praktik pengelolaan terbaik (PPT) untuk gambut. Kelompok memiliki rencana aksi untuk meminimalkan risiko kebakaran, menerapkan PPT untuk penanaman di atas gambut, dan mengelola sistem air di dalam unit sertifikasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pekebun telah ikut serta dalam pelatihan mengenai praktik pengelolaan terbaik (PPT) untuk gambut? 2. Apa bukti bahwa pelatihan telah dilakukan? Siapa yang memberikan pelatihan? 3. Kapan pelatihan diberikan? 4. Apakah kelompok telah membuat rencana aksi untuk meminimalkan risiko kebakaran, menerapkan PPT untuk penanaman di atas gambut, dan mengelola sistem air di dalam unit sertifikasi? 5. Apakah sistem pencegah kebakaran tersedia? 6. Apakah pekebun dapat menunjukkan pemahamannya mengenai praktik pengelolaan terbaik (PPT) untuk gambut, termasuk rencana aksi untuk meminimalkan risiko kebakaran dan mengelola sistem air?

Kriteria	Indikator	Daftar Periksa
<p>4.4 Jika petak lahan pekebun berada di atas gambut, pelesakan/subsidi dan degradasi tanah gambut tersebut diminimalkan melalui penerapan praktik pengelolaan terbaik (PPT).</p> <p>Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang memiliki petak lahan yang berada di atas gambut? Jika tidak, LEWATKAN bagian ini.</p>	<p>4.4 TC B Pekebun melaksanakan rencana aksi berdasarkan PPT, termasuk pengelolaan kebakaran dan air, dan pemantauan laju subsidi untuk penanaman yang masih ada saat ini di atas gambut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pekebun telah menerapkan rencana aksi untuk meminimalkan risiko kebakaran, menerapkan PPT untuk penanaman di atas gambut, dan mengelola sistem air di dalam unit sertifikasi? 2. Apa bukti penerapan rencana aksi? 3. Apakah sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran tersedia? 4. Bagaimana pekebun memantau laju subsidi untuk penanaman yang saat ini masih berada di atas gambut? 5. Bagaimana pekebun memantau tingkat muka air untuk penanaman yang saat ini masih berada di atas gambut?
<p>4.5 Petak lahan yang berada di atas gambut ditanami kembali hanya pada kawasan-kawasan tertentu yang memiliki risiko rendah akan terjadinya banjir atau intrusi air asin sebagaimana dibuktikan dalam penilaian risiko.</p> <p>Apakah ada pekebun di dalam kelompok yang berencana menanami kembali petak lahan yang berada di atas gambut? Jika tidak, LEWATI bagian ini.</p>	<p>4.5 E Pekebun berkomitmen untuk memberikan informasi mengenai semua rencana penanaman kembali dan berkomitmen bahwa penanaman kembali hanya akan dilakukan di kawasan-kawasan yang berisiko rendah terhadap terjadinya banjir atau intrusi air asin (lih. Bagian 1.1.E, Lampiran 2).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pekebun telah menandatangani pernyataan berkomitmen untuk: <ul style="list-style-type: none"> • memberikan informasi mengenai semua rencana penanaman kembali dan • bahwa penanaman kembali hanya dapat dilakukan di kawasan dengan risiko rendah banjir dan intrusi air asin. 2. Apakah manajer kelompok telah mengumpulkan dan menyusun informasi mengenai penanaman kembali oleh anggota kelompok?

Criteria	Indicators	Checklist
<p>4.5 Petak lahan yang berada di atas gambut ditanami kembali hanya pada kawasan-kawasan tertentu yang memiliki risiko rendah akan terjadinya banjir atau intrusi air asin sebagaimana dibuktikan dalam penilaian risiko.</p> <p>Apakah ada pekebum di dalam kelompok yang berencana menanam kembali petak lahan yang berada di atas gambut? Jika tidak, LEWATI bagian ini.</p>	<p>4.5 TC A Pekebum yang petak lahannya berada di atas gambut menyelesaikan pelatihan tentang identifikasi risiko banjir yang berkaitan dengan pelesakan/subsidiensi dan alternatif strategi pengembangan lahan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pekebum yang petak lahannya berada di atas gambut ikut serta dalam pelatihan mengenai identifikasi pada risiko banjir dan alternatif strategi pengembangan lahan di masa mendatang? 2. Apa bukti bahwa pelatihan telah dilakukan? 3. Siapa yang memberikan pelatihan? 4. Kapan pelatihan diberikan? 5. Apakah pekebum menyadari adanya risiko terkait subsidiensi? Apa risiko teridentifikasi yang terkait dengan subsidiensi? 6. Apakah alternatif strategi pengembangan lahan telah diidentifikasi?
	<p>4.5 TC B Sebelum melakukan penanaman kembali di atas gambut, pekebum menyelesaikan penilaian risiko terkait banjir dan subsidiensi, dan jika terdapat risiko tinggi, pekebum menyampaikan rencana yang mencakup alternatif strategi pengembangan lahan dengan lebih mengutamakan alternatif rencana mata pencaharian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada penanaman kembali di atas gambut oleh pekebum di dalam kelompok? 2. Apakah penilaian risiko terkait banjir yang berkaitan dengan subsidiensi telah dilakukan sebelum penanaman kembali? 3. Apa risiko yang teridentifikasi dalam penilaian risiko tersebut? 4. Untuk area dengan risiko tinggi, apakah ada rencana yang menyertakan alternatif strategi pengembangan lahan dengan mengutamakan alternatif perencanaan mata pencaharian? 5. Apakah manajer kelompok mengetahui kegiatan penanaman kembali (di atas gambut) oleh anggota kelompok?

LAMPIRAN 2: SOP YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK RENCANA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

(Versi adaptasi SOP Pemadaman Kebakaran Lahan, KUD Makarti No.23/SOP-KUD-MKRSM/IV/2019)

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran, ada beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian

1. Jika ditemukan adanya titik api, maka api harus segera dipadamkan dengan peralatan dasar.
2. Anggota kelompok harus melapor ke Sistem Pengendalian Internal kelompok atau Unit Darurat Api jika peralatan dasar yang ada tidak memadai untuk memadamkan api.
3. Unit Darurat Api akan segera melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran atau lembaga terkait.
4. Semua anggota kelompok bertanggung jawab untuk memadamkan api dan melakukan evaluasi.

LAMPIRAN 3: TABEL/SOP YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK PEMANTAUAN KETINGGIAN MUKA AIR

(Versi adaptasi dari Kelompok Petani Swadaya 1 Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah No.022/ DOK/ SOP/ APSSA/ 2020 tanggal 12 Februari, 2020)

1. Menjaga ketinggian muka air dengan membuat saluran drainase dan membangun bendungan sederhana untuk memantau ketinggian muka air.
2. Bendungan sederhana dibangun di titik-titik tertentu. Saluran buangan utama dan biaya pembuatannya secara khusus akan ditanggung oleh kelompok petani.
3. Titik tinggi muka air pada bendungan sederhana akan dipantau setiap satu bulan.
4. Untuk memantau ketinggian muka air, saluran drainase akan menjadi alat ukur ketinggian muka air yang dibuat dengan pipa PVC. Panjang pipa PVC harus 2 meter (1,5 meter di atas saluran pengumpul dan sisanya (50 cm) harus diletakkan di bawah tanah).
5. Pengukuran pada bendungan sederhana ditetapkan sebagai 0 dari permukaan tanah.
6. Ukuran pada pipa PVC (0cm, 10cm, 30cm, ..., 150cm) diberi tanda warna merah dengan warna dasar putih dan ukuran maksimal (60cm & 80cm) diberi tanda warna hitam.
7. Bahan untuk membuat bendungan sederhana harus kedap air dan digunakan sebagai penopang (seperti bambu) dan ditempatkan dalam karung pasir.
8. Tim NKT mengidentifikasi titik-titik lokasi untuk membangun bendungan sederhana.
9. Hasilnya harus dilaporkan kepada pengelola kelompok guna mendapatkan persetujuan pembangunan bendungan sederhana.
10. Bendungan sederhana akan dibangun setelah pengelola kelompok menyetujui permohonan ini.
11. Setelah bendungan sederhana selesai dibangun, tim NKT akan mengevaluasi keefektifan bendungan dan terus memantau ketinggian air setiap bulan
12. Memasang tiang subsidi yang terbuat dari pipa besi untuk memantau penurunan muka air.
13. Tim NKT mengidentifikasi titik-titik lokasi dari tiang subsidi yang terpasang.
14. Hasilnya harus dilaporkan kepada pengelola kelompok guna mendapatkan persetujuan pembangunan bendungan sederhana.
15. Tiang subsidi akan dibangun setelah pengelola kelompok menyetujui permohonan ini.
16. Setelah tiang subsidi dibangun, tim NKT akan mengevaluasi efektivitas bendungan dan terus memantau ketinggian air setiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Pelibatan Komunitas dalam Restorasi Gambut: Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa), Berita dari Lanskap, USAID. Diakses dari <https://www.lestari indonesia.org/en/community-engagement-peatland-restoration-free-prior-informed-consent-fpic/>

Klausul 6.1 Sistem Manajemen Kualitas 9001:2015

INTERNATIONAL SOCIETY OF SOIL SCIENCE – IUSS. 1930. Laporan kepada The Subcommission for Peat Soils of The International Society of Soil Science. Washington D.C., AS, Bureau of Chemistry and Soils

Mandych, A. F. (2009). Classification of floods. *Water Interactions with Energy, Environment, Food and Agriculture-Volume II*, 218.

Paramananthan, S. 2016. Organic Soils of Malaysia: Their characteristics, mapping, classification and management for oil palm cultivation. MPOC, hal. 156.

Parish, F., Lew, S.Y., Faizuddin, M. dan Giesen, W. (Ed.). 2019. RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for Management and Rehabilitation of Peatlands. Edisi Kedua, RSPO, Kuala Lumpur.

Sideman, B. (2016). *Growing Vegetables: Tomatoes*. UNH Cooperative Extensions.

Singh, P. K., & Hiremath, B. N. (2010). Sustainable livelihood security index in a developing country: a tool for development planning. *Ecological Indicators*, 10, 442e451.

RITZEMA, H.P., MUTALIB MAT HASSAN, A. dan MOENS, R.P. 1998. A New Approach to Water management of Tropical Peatlands: A Case Study from Malaysia. *Irrigation and Drainage Systems* 12 (1998) 2, hal.123-139

WÜST, R. A., & BUSTIN, R. M. 2004. Late Pleistocene and Holocene development of the interior peat-accumulating basin of tropical Tasek Bera, Peninsular Malaysia. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 211(3-4), 241- 270.

RSPO adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk sawit berkelanjutan melalui standar internasional yang kredibel dan pelibatan pemangku kepentingan.

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa,
No 3, Jalan Bangsar Utama 1,
59000, Kuala Lumpur, Malaysia

Other Offices:

Jakarta, Indonesia
London, United Kingdom
Beijing, China
Bogota, Colombia
New York, USA
Zoetermeer, Netherlands

 smallholder@rspo.org

 www.rspo.org